BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAGIAN BESARAN SERTA PETUNJUK PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dalam rangka pengoptimalan penyelenggaraaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Besaran serta Petunjuk Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

17. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 4);

28. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAGIAN BESARAN SERTA PETUNJUK PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.

3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.

5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pada pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehPemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia

8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.

9. Keuchik adalah Kepala Pemeritah Gampong yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

10. Tuha Peuet Gampong adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong.

11. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Gampong yang selanjutnya disingkat RPJP adalah hasil musyawarah masyarakat gampong tentang

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Dokumen Perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.

13. Qanun Gampong adalah peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang dibuat oleh Tuha Peuet Gampong bersama Keuchik.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

15. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

17. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBK yang dialokasikan kepada gampong berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan gampong.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

19. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut.

20. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan gampong.

21. Tim Pelaksana di tingkat Gampong yang selanjutnya disebut Timlak adalah Tim yang dibentuk oleh Keuchik yang bertugas melaksanakan kegiatan fisik yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

22. Pembinaan adalah pemberian pedoman standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud diberikannya Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pembinaan kemasyarakatan gampong.

(2) Tujuan diberikannya Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong adalah :
a. mewujudkan pemerintahan gampong yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung-jawab;
b. meningkatkan nilai-nilai keagamaan, adat dan sosial budaya dalam rangka penguatan pemerintahan gampong;
c. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
d. memajukan perekonomian masyarakat gampong serta pemberdayaan masyarakat gampong;
e. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat gampong guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
f. mengefektifkan perencanaan pembangunan gampong dengan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat gampong untuk pengembangan potensi dan aset gampong guna kesejahteraan bersama;
g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat gampong guna mewujudkan masyarakat gampong yang mampu memelihara kesatuan sosial;
h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan gampong; dan
i. meningkatkan pendapatan gampong dan ekonomi masyarakat gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

BAB III
SUMBER PENDANAAN DAN PENENTUAN BESARAN

Paragraf Kesatu

Sumber Dana

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagi hasil pajak kepada gampong

(2) Pendanaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong bersumber dari APBK.

Paragraf Kedua

Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 4

(1) Besaran Bagi Hasil Pajak untuk Gampong ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah.

(2) Sumber Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Gampong berasal dari penerimaan pajak daerah yang diterima oleh daerah melalui kas daerah.

(3) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan :
a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh gampong; dan
b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dari masing-masing gampong.

(4) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah setiap gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai berikut :
a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata sejumlah gampong, dengan cara (10% x Hasil Pajak Daerah x 60%) / Jumlah gampong se-Kabupaten Aceh Selatan.
b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional untuk gampong sesuai kontribusi pemasukan pajak daerah dari masing-masing gampong terhadap total pemasukan pajak gampong se-Kabupaten Aceh Selatan, dengan cara (10% x Hasil Pajak Daerah x 40%) x (jumlah pemasukan pajak daerah dari gampong yang bersangkutan / total pemasukan pajak daerah dari gampong se-Kabupaten).

Paragraf Ketiga
Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 5

(1) Besaran Bagi Hasil Retribusi untuk Gampong ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan retribusi daerah.

(2) Sumber Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong berasal dari penerimaan retribusi yang diterima oleh daerah melalui kas daerah.

(3) Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan :
a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh gampong; dan
b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil retribusi dari masing-masing gampong dan atau kecamatan.

(4) Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai berikut :
a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata sejumlah gampong, dengan cara (10% x Hasil Retribusi Daerah x 60%) / Jumlah gampong se-Kabupaten Aceh Selatan.
b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional untuk gampong sesuai kontribusi pemasukan retribusi daerah dari masing-masing gampong dan atau kecamatan terhadap total pemasukan retribusi gampong se-Kabupaten Aceh Selatan, dengan cara (10% x Hasil Retribusi Daerah x 40%) x (jumlah pemasukan retribusi daerah dari gampong yang bersangkutan / total pemasukan retribusi daerah dari gampong se-Kabupaten Aceh Selatan).

Pasal 6

(1) Sumber data dalam perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dan pasal 5 ayat (3) adalah :
a. nama dan kode wilayah gampong bersumber dari Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten;
b. jumlah pemasukan pajak dan retribusi masing-masing gampong dan atau kecamatan bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

(2) Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing gampong dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan Petunjuk Teknis beserta Dokumen Pengajuan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Selatan ini.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten wajib membina, mengawasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong,

(2) Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Tim Fasilitasi.

Pasal 8

(1) Ditingkat Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong;
b. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
c. melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong; dan
d. memberikan laporan kepada Bupati.

Pasal 9

(1) Ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong;
b. melakukan pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong;
c. melakukan pembinaan administrasi keuangan gampong;
d. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
e. memberikan laporan kepada Tim Koordinasi.

Pasal 10

(1) Keuchik dapat membentuk Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola pada tiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong.

(2) Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

BAB V
PERSYARATAN PENGAJUAN

Pasal 11

(1) Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong sebagai berikut :
   a. telah diverifikasi dan direkomendasikan layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Pendamping dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
      1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) telah ditetapkan, serta telah dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten.
      2. semua pekerjaan/kegiatan tahun dan atau tahap sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3. telah melakukan pemungutan dan penyetoran PBB berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan/atau tahun berkenaan; dan
      4. mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah.
   b. melengkapi/mencukupi dokumen sebagai berikut :
      1. permohonan penyaluran dari Keuchik/Pj. Keuchik kepada Bupati,
      2. fotokopi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong (untuk pengajuan tahap I);
      3. fotokopi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Gampong (untuk pengajuan tahap I);
      4. fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) (untuk pengajuan tahap I dan tahap IV bila ada perubahan APBG);
      5. fotokopi Surat Keputusan (SK) Penunjukan Bank sebagai Penyimpan dan Pencairan (dilegalisir Keuchik/Pj. Keuchik);
      6. fotokopi rekening kas gampong (mengetahui Keuchik/Pj. Keuchik);
      7. fotokopi Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Keuchik.
      8. fotokopi Surat Keputusan (SK) Bendahara Gampong (dilegalisir Keuchik/ Pj.Keuchik);
      9. fotokopi KTP Keuchik/Pj. Keuchik, dan Bendahara Gampong;
      10. pakta integritas bermaterai cukup;
      11. kwitansi penerimaan bermaterai cukup.

(2) Pengecualian dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 12

(1) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong dianggarkan setiap tahun dalam APBK.

(2) Bupati menetapkan besaran sementara Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong untuk masing-masing gampong setiap awal tahun anggaran.

(3) Pemerintah Gampong membuka rekening kas gampong pada Bank.

(4) Keuchik mengajukan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong kepada Bupati melalui Camat.

(5) Camat meneruskan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

(6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten meneruskan berkas permohonan penyaluran berikut lampirannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

(7) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten dengan persetujuan Bupati melalui Kas Daerah ke Rekening Kas Gampong.

(8) Bentuk persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

(9) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong melalui Bank 100%, dengan tahapan yaitu :
a. tahap I pada bulan Maret, sebesar 40% (empat puluh per seratus);
b. tahap II pada bulan Agustus, sebesar 40% (empat puluh per seratus);
c. tahap III pada bulan Oktober, sebesar 20% (dua puluh per seratus).

(10) Dalam hal terjadi selisih perhitungan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati berdasarkan perhitungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

(11) Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong pada akhir tahun anggaran berjalan maka akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PENGGUNAAN

Pasal 13

(1) Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pembinaan kemasyarakatan gampong.

(2) Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong mengacu pada RPJMG dan RKPG.

BAB VIII
PENGELOLAAN

Pasal 14

(1) Pengelolaan keuangan gampong dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(2) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong merupakan bagian dari sumber pendapatan gampong.

(3) Besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong dituangkan dalam Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

(4) Keuchik atau Penjabat Keuchik sebagai pemegang kekuasaan keuangan gampong bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong.

Pasal 15

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBG harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Pengeluaran kas gampong yang mengakibatkan beban APBG tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan menjadi Qanun Gampong.

(3) Bendahara Gampong sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kegiatan yang dibiayai dengan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

(2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Gampong.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 18

(1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap akhir tahun anggaran kepada Tim Fasilitasi paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(2) Tim Fasilitasi melaporkan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.

(3) Dalam hal Keuchik tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

Pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal Desember 2016

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 42

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAGIAN BESARAN SERTA PETUNJUK PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		
				Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	11.01.01.2001	KEUDE BAKONGAN	BAKONGAN	4,176,824	3,816,482	7,993,306
2	11.01.01.2002	UJONG MANGKI	BAKONGAN	3,792,951	3,816,482	7,609,433
3	11.01.01.2003	UJONG PADANG	BAKONGAN	4,331,063	3,816,482	8,147,545
4	11.01.01.2004	GAMPONG DRIEN	BAKONGAN	3,918,498	3,816,482	7,734,980
5	11.01.01.2015	DARUL IKHSAN	BAKONGAN	3,624,631	3,816,482	7,441,113
6	11.01.01.2016	PADANG BEURAHAN	BAKONGAN	3,020,932	3,816,482	6,837,414
7	11.01.01.2017	GAMPONG BARO	BAKONGAN	3,514,134	3,816,482	7,330,616
8	11.01.02.2001	FAJAR HARAPAN	KLUET UTARA	4,331,052	6,382,517	10,713,569
9	11.01.02.2002	KRUENG BATEE	KLUET UTARA	4,651,205	6,382,517	11,033,722
10	11.01.02.2003	PASI KUALA ASAHAN	KLUET UTARA	5,062,088	6,382,517	11,444,605
11	11.01.02.2004	GUNONG PULO	KLUET UTARA	3,507,224	6,382,517	9,889,741
12	11.01.02.2005	PULO IE I	KLUET UTARA	3,164,194	6,382,517	9,546,711
13	11.01.02.2006	JAMBO MANYANG	KLUET UTARA	4,202,722	6,382,517	10,585,239
14	11.01.02.2007	SIMPANG EMPAT	KLUET UTARA	6,218,057	6,382,517	12,600,574
15	11.01.02.2008	LIMAUPURUT	KLUET UTARA	3,830,109	6,382,517	10,212,626
16	11.01.02.2009	PULO KAMBING	KLUET UTARA	3,269,257	6,382,517	9,651,774
17	11.01.02.2010	KAMPUNG PAYA	KLUET UTARA	3,238,966	6,382,517	9,621,483
18	11.01.02.2011	KRUENG BATU	KLUET UTARA	3,877,630	6,382,517	10,260,147
19	11.01.02.2012	KRUENG KLUET	KLUET UTARA	3,420,704	6,382,517	9,803,221
20	11.01.02.2013	ALURMAS	KLUET UTARA	4,656,855	6,382,517	11,039,372
21	11.01.02.2016	SIMPANG LHEE	KLUET UTARA	3,325,535	6,382,517	9,708,052
22	11.01.02.2017	SUAQ GERINGGENG	KLUET UTARA	3,876,972	6,382,517	10,259,489
23	11.01.02.2018	PASI KUALA BA'U	KLUET UTARA	5,631,714	6,382,517	12,014,231
24	11.01.02.2019	KEDAI PADANG	KLUET UTARA	4,290,254	6,382,517	10,672,771
25	11.01.02.2020	KOTAFAJAR	KLUET UTARA	5,545,682	6,382,517	11,928,199
26	11.01.02.2021	GUNUNG PUDUNG	KLUET UTARA	4,045,823	6,382,517	10,428,340
27	11.01.02.2022	KAMPUNG TINGGI	KLUET UTARA	5,348,873	6,382,517	11,731,390
28	11.01.02.2023	RUAK	KLUET UTARA	3,794,784	6,382,517	10,177,301
29	11.01.03.2018	SUAQ BAKUNG	KLUET SELATAN	4,095,842	6,128,312	10,224,154
30	11.01.03.2002	RANTAU BINUANG	KLUET SELATAN	3,419,819	6,128,312	9,548,131
31	11.01.03.2003	BARAT DAYA	KLUET SELATAN	4,514,718	6,128,312	10,643,030
32	11.01.03.2004	SIALANG	KLUET SELATAN	3,607,000	6,128,312	9,735,312
33	11.01.03.2005	KAPEH	KLUET SELATAN	4,758,530	6,128,312	10,886,842
34	11.01.03.2006	PULO IE	KLUET SELATAN	3,506,587	6,128,312	9,634,899
35	11.01.03.2007	KEDAI RUNDING	KLUET SELATAN	5,697,324	6,128,312	11,825,636
36	11.01.03.2008	KEDAI KANDANG	KLUET SELATAN	3,478,295	6,128,312	9,606,607
37	11.01.03.2009	GAMPONG LUAR	KLUET SELATAN	3,668,210	6,128,312	9,796,522
38	11.01.03.2010	UJUNG	KLUET SELATAN	3,458,207	6,128,312	9,586,519

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		
				Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39	11.01.03.2011	JUA	KLUET SELATAN	4,190,036	6,128,312	10,318,348
40	11.01.03.2012	PASI MEURAPAT	KLUET SELATAN	3,582,337	6,128,312	9,710,649
41	11.01.03.2013	UJUNG PASIR	KLUET SELATAN	4,234,707	6,128,312	10,363,019
42	11.01.03.2014	GEULUMBUK	KLUET SELATAN	4,595,896	6,128,312	10,724,208
43	11.01.03.2015	PASIE LEMBANG	KLUET SELATAN	4,830,143	6,128,312	10,958,455
44	11.01.03.2016	UJUNG PADANG	KLUET SELATAN	4,084,903	6,128,312	10,213,215
45	11.01.03.2017	INDRA DAMAI	KLUET SELATAN	4,449,975	6,128,312	10,578,287
46	11.01.04.2001	BAKAU HULU	LABUHANHAJI	5,029,981	2,409,317	7,439,298
47	11.01.04.2002	PADANG BAKAU	LABUHANHAJI	3,901,857	2,409,317	6,311,174
48	11.01.04.2003	MANGGIS HARAPAN	LABUHANHAJI	4,959,072	2,409,317	7,368,389
49	11.01.04.2004	PASAR LAMA	LABUHANHAJI	3,378,019	2,409,317	5,787,336
50	11.01.04.2005	APHA	LABUHANHAJI	4,447,639	2,409,317	6,856,956
51	11.01.04.2006	UJUNG BATU	LABUHANHAJI	3,973,056	2,409,317	6,382,373
52	11.01.04.2007	PAWOH	LABUHANHAJI	3,924,534	2,409,317	6,333,851
53	11.01.04.2008	DALAM	LABUHANHAJI	3,395,517	2,409,317	5,804,834
54	11.01.04.2009	KOTA PALAK	LABUHANHAJI	3,305,153	2,409,317	5,714,470
55	11.01.04.2010	CACANG	LABUHANHAJI	3,755,199	2,409,317	6,164,516
56	11.01.04.2011	TENGAH PISANG	LABUHANHAJI	3,899,357	2,409,317	6,308,674
57	11.01.04.2012	PISANG	LABUHANHAJI	3,530,218	2,409,317	5,939,535
58	11.01.04.2013	HULU PISANG	LABUHANHAJI	4,766,564	2,409,317	7,175,881
59	11.01.04.2014	TENGAH BARU	LABUHANHAJI	3,607,221	2,409,317	6,016,538
60	11.01.04.2015	LEMBAH BARU	LABUHANHAJI	2,823,504	2,409,317	5,232,821
61	11.01.04.2016	PADANG BARU	LABUHANHAJI	3,566,471	2,409,317	5,975,788
62	11.01.05.2024	KUTA BULOH II	MEUKEK	4,020,256	2,853,201	6,873,457
63	11.01.05.2002	KUTA BULOH I	MEUKEK	5,719,976	2,853,201	8,573,177
64	11.01.05.2003	IE DINGEN	MEUKEK	4,039,348	2,853,201	6,892,549
65	11.01.05.2004	DRIEN JALO	MEUKEK	3,410,252	2,853,201	6,263,453
66	11.01.05.2005	JAMBO PAPEUN	MEUKEK	3,945,825	2,853,201	6,799,026
67	11.01.05.2006	BUKIT MEUH	MEUKEK	2,779,670	2,853,201	5,632,871
68	11.01.05.2007	BLANG KUALA	MEUKEK	4,129,539	2,853,201	6,982,740
69	11.01.05.2008	ROT TEUNGOH	MEUKEK	3,448,520	2,853,201	6,301,721
70	11.01.05.2009	ALUE BARO	MEUKEK	4,451,154	2,853,201	7,304,355
71	11.01.05.2010	LADANG TUHA	MEUKEK	3,337,917	2,853,201	6,191,118
72	11.01.05.2011	LHOK MAMPLAM	MEUKEK	2,852,909	2,853,201	5,706,110
73	11.01.05.2012	ARUN TUNGGAI	MEUKEK	4,146,925	2,853,201	7,000,126
74	11.01.05.2013	BLANG TEUNGOH	MEUKEK	4,167,905	2,853,201	7,021,106
75	11.01.05.2014	BLANG BLADEH	MEUKEK	3,513,361	2,853,201	6,366,562
76	11.01.05.2015	IE BUBOH	MEUKEK	4,325,400	2,853,201	7,178,601
77	11.01.05.2016	KEUDE MEUKEK	MEUKEK	3,518,324	2,853,201	6,371,525
78	11.01.05.2017	KUTA BARO	MEUKEK	3,362,040	2,853,201	6,215,241
79	11.01.05.2018	TANJUNG HARAPAN	MEUKEK	3,821,442	2,853,201	6,674,643
80	11.01.05.2019	LABUHAN TAROK	MEUKEK	3,758,469	2,853,201	6,611,670
81	11.01.05.2020	LHOK AMAN	MEUKEK	3,816,010	2,853,201	6,669,211
82	11.01.05.2021	ALUE MEUTUAH	MEUKEK	3,790,692	2,853,201	6,643,893
83	11.01.05.2022	LADANG BARO	MEUKEK	3,307,816	2,853,201	6,161,017
84	11.01.05.2023	LABUHAN TAROK II	MEUKEK	3,756,884	2,853,201	6,610,085
85	11.01.06.2001	DALAM	SAMADUA	2,589,634	2,276,526	4,866,160
86	11.01.06.2002	SUBARANG	SAMADUA	2,932,988	2,276,526	5,209,514
87	11.01.06.2003	KOTA BARU	SAMADUA	3,318,511	2,276,526	5,595,037
88	11.01.06.2004	GUNUNG KETEK	SAMADUA	2,838,635	2,276,526	5,115,161
89	11.01.06.2005	LADANG PANTON LUAS	SAMADUA	3,144,063	2,276,526	5,420,589
90	11.01.06.2006	MADAT	SAMADUA	3,565,325	2,276,526	5,841,851
91	11.01.06.2007	ALUR SUMERAH	SAMADUA	3,447,774	2,276,526	5,724,300

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		
				Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
92	11.01.06.2008	TENGAH	SAMADUA	2,859,362	2,276,526	5,135,888
93	11.01.06.2009	GUNUNG CUT	SAMADUA	4,065,770	2,276,526	6,342,296
94	11.01.06.2010	ALUR PINANG	SAMADUA	3,506,443	2,276,526	5,782,969
95	11.01.06.2011	KUTA BLANG	SAMADUA	3,832,161	2,276,526	6,108,687
96	11.01.06.2012	BATEE TUNGGAI	SAMADUA	3,367,557	2,276,526	5,644,083
97	11.01.06.2013	UJUNG TANAH	SAMADUA	2,890,098	2,276,526	5,166,624
98	11.01.06.2014	UJUNG KAMPUNG	SAMADUA	3,030,339	2,276,526	5,306,865
99	11.01.06.2015	JILATANG	SAMADUA	3,348,453	2,276,526	5,624,979
100	11.01.06.2016	LUAR	SAMADUA	3,591,242	2,276,526	5,867,768
101	11.01.06.2017	LUBUK LAYU	SAMADUA	3,317,123	2,276,526	5,593,649
102	11.01.06.2018	SUAQ HULU	SAMADUA	3,452,103	2,276,526	5,728,629
103	11.01.06.2019	TAMPANG	SAMADUA	3,153,749	2,276,526	5,430,275
104	11.01.06.2020	PAYONAN GADANG	SAMADUA	3,412,420	2,276,526	5,688,946
105	11.01.06.2021	GADANG	SAMADUA	3,523,498	2,276,526	5,800,024
106	11.01.06.2022	BARU	SAMADUA	3,309,603	2,276,526	5,586,129
107	11.01.06.2023	LADANG KASIK PUTIH	SAMADUA	3,117,047	2,276,526	5,393,573
108	11.01.06.2024	AIR SIALANG HILIR	SAMADUA	3,274,255	2,276,526	5,550,781
109	11.01.06.2025	AIR SIALANG HULU	SAMADUA	3,221,011	2,276,526	5,497,537
110	11.01.06.2026	AIR SIALANG TENGAH	SAMADUA	3,035,081	2,276,526	5,311,607
111	11.01.06.2027	BALAI	SAMADUA	2,740,614	2,276,526	5,017,140
112	11.01.06.2028	ARAFAH	SAMADUA	3,878,090	2,276,526	6,154,616
113	11.01.07.2001	SIKULAT	SAWANG	2,841,402	2,054,531	4,895,933
114	11.01.07.2002	SAWANG I	SAWANG	3,844,302	2,054,531	5,898,833
115	11.01.07.2003	MEULIGO	SAWANG	3,224,321	2,054,531	5,278,852
116	11.01.07.2004	LHOK PAWOH	SAWANG	3,104,916	2,054,531	5,159,447
117	11.01.07.2005	SAWANG II	SAWANG	2,856,492	2,054,531	4,911,023
118	11.01.07.2006	UJUNG KARANG	SAWANG	2,764,003	2,054,531	4,818,534
119	11.01.07.2007	TRIENG MEUDURO BAROH	SAWANG	3,845,879	2,054,531	5,900,410
120	11.01.07.2008	TRIENG MEUDURO TUNONG	SAWANG	4,567,674	2,054,531	6,622,205
121	11.01.07.2009	PANTON LUAS	SAWANG	3,300,248	2,054,531	5,354,779
122	11.01.07.2010	SIMPANG TIGA	SAWANG	3,743,842	2,054,531	5,798,373
123	11.01.07.2011	KUTA BARO	SAWANG	3,142,921	2,054,531	5,197,452
124	11.01.07.2012	BLANG GELINGGANG	SAWANG	3,937,510	2,054,531	5,992,041
125	11.01.07.2013	MUTIARA	SAWANG	2,745,252	2,054,531	4,799,783
126	11.01.07.2014	UJUNG PADANG	SAWANG	4,535,782	2,054,531	6,590,313
127	11.01.07.2015	SAWANG BA'U	SAWANG	3,717,330	2,054,531	5,771,861
128	11.01.08.2017	LHOK KEUTAPANG	TAPAKTUAN	3,924,367	2,054,531	5,978,898
129	11.01.08.2018	HILIR	TAPAKTUAN	4,777,531	2,054,531	6,832,062
130	11.01.08.2019	PADANG	TAPAKTUAN	4,974,952	2,054,531	7,029,483
131	11.01.08.2020	HULU	TAPAKTUAN	4,085,670	2,054,531	6,140,201
132	11.01.08.2021	JAMBO APHA	TAPAKTUAN	7,610,602	2,054,531	9,665,133
133	11.01.08.2022	TEPI AIR	TAPAKTUAN	2,682,144	2,054,531	4,736,675
134	11.01.08.2023	PASAR	TAPAKTUAN	4,409,764	2,054,531	6,464,295
135	11.01.08.2024	LHOK BENGKUANG	TAPAKTUAN	4,799,480	2,054,531	6,854,011
136	11.01.08.2009	PANTON LUAS	TAPAKTUAN	2,676,013	2,054,531	4,730,544
137	11.01.08.2010	GUNUNG KERAMBIL	TAPAKTUAN	3,368,547	2,054,531	5,423,078
138	11.01.08.2011	AIR BERUDANG	TAPAKTUAN	3,449,775	2,054,531	5,504,306
139	11.01.08.2012	BATU ITAM	TAPAKTUAN	4,073,389	2,054,531	6,127,920
140	11.01.08.2013	PANJUPIAN	TAPAKTUAN	3,430,780	2,054,531	5,485,311
141	11.01.08.2014	LHOK RUKAM	TAPAKTUAN	3,353,631	2,054,531	5,408,162
142	11.01.08.2015	AIR PINANG	TAPAKTUAN	3,575,167	2,054,531	5,629,698
143	11.01.08.2016	LHOK BENGKUANG TIMUR	TAPAKTUAN	3,870,943	2,054,531	5,925,474
144	11.01.09.2001	KEUDE TRUMON	TRUMON	5,253,384	3,450,023	8,703,407

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		
				Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
145	11.01.09.2002	UJONG TANOH	TRUMON	2,681,880	3,450,023	6,131,903
146	11.01.09.2003	SIGLENG	TRUMON	2,792,146	3,450,023	6,242,169
147	11.01.09.2004	IE MEUDAMA	TRUMON	3,601,167	3,450,023	7,051,190
148	11.01.09.2005	TEUPIN TINGGI	TRUMON	4,100,333	3,450,023	7,550,356
149	11.01.09.2006	KUTA BARO	TRUMON	4,994,656	3,450,023	8,444,679
150	11.01.09.2007	PANTON BILIE	TRUMON	4,175,873	3,450,023	7,625,896
151	11.01.09.2012	KUTA PADANG	TRUMON	3,378,932	3,450,023	6,828,955
152	11.01.09.2013	RAKET	TRUMON	4,026,064	3,450,023	7,476,087
153	11.01.09.2014	GAMPONG TEUNGOH	TRUMON	4,117,996	3,450,023	7,568,019
154	11.01.09.2015	SENEUBOK JAYA	TRUMON	5,162,055	3,450,023	8,612,078
155	11.01.09.2016	PADANG HARAPAN	TRUMON	2,846,553	3,450,023	6,296,576
156	11.01.10.2001	LADANG TEUNGOH	PASIE RAJA	4,554,226	3,249,316	7,803,542
157	11.01.10.2002	PUCOK KRUENG	PASIE RAJA	3,543,153	3,249,316	6,792,469
158	11.01.10.2003	SILOLO	PASIE RAJA	4,913,908	3,249,316	8,163,224
159	11.01.10.2004	KAMPUNG BARU	PASIE RAJA	4,585,398	3,249,316	7,834,714
160	11.01.10.2005	PANTON BILI	PASIE RAJA	3,182,812	3,249,316	6,432,128
161	11.01.10.2006	PAYA ATEUK	PASIE RAJA	3,484,992	3,249,316	6,734,308
162	11.01.10.2007	LADANG TUHA	PASIE RAJA	5,148,888	3,249,316	8,398,204
163	11.01.10.2008	MATA IE	PASIE RAJA	3,580,402	3,249,316	6,829,718
164	11.01.10.2009	UJONG BATEE	PASIE RAJA	4,391,431	3,249,316	7,640,747
165	11.01.10.2010	LHOK SIALANG CUT	PASIE RAJA	3,646,088	3,249,316	6,895,404
166	11.01.10.2011	SEUNEUBOK	PASIE RAJA	5,148,421	3,249,316	8,397,737
167	11.01.10.2012	IE MIRAH	PASIE RAJA	4,841,825	3,249,316	8,091,141
168	11.01.10.2013	PASIE RASIAN	PASIE RAJA	4,505,395	3,249,316	7,754,711
169	11.01.10.2014	UJUNG PADANG RASIAN	PASIE RAJA	4,952,882	3,249,316	8,202,198
170	11.01.10.2015	KRUENG KALEE	PASIE RAJA	3,693,318	3,249,316	6,942,634
171	11.01.10.2016	LHOK SIALANG RAYEUK	PASIE RAJA	5,163,313	3,249,316	8,412,629
172	11.01.10.2017	GAMPONG BARO	PASIE RAJA	3,155,367	3,249,316	6,404,683
173	11.01.10.2018	TEUPIN GAJAH	PASIE RAJA	4,676,412	3,249,316	7,925,728
174	11.01.10.2019	UJUNG PADANG ASAHAN	PASIE RAJA	4,667,328	3,249,316	7,916,644
175	11.01.10.2020	PULO IE II	PASIE RAJA	6,094,787	3,249,316	9,344,103
176	11.01.10.2021	PANTE RAJA	PASIE RAJA	4,877,961	3,249,316	8,127,277
177	11.01.11.2001	TENGAH PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	4,143,552	2,054,531	6,198,083
178	11.01.11.2002	PAYA PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	3,039,910	2,054,531	5,094,441
179	11.01.11.2003	PADANG PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	2,725,158	2,054,531	4,779,689
180	11.01.11.2004	AUR PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	3,436,760	2,054,531	5,491,291
181	11.01.11.2005	LIMAU SARING	LABUHANHAJI TIMUR	4,101,391	2,054,531	6,155,922
182	11.01.11.2006	BEUTONG	LABUHANHAJI TIMUR	3,126,243	2,054,531	5,180,774
183	11.01.11.2007	PEUNEULOP	LABUHANHAJI TIMUR	3,966,000	2,054,531	6,020,531
184	11.01.11.2008	GUNUNG ROTAN	LABUHANHAJI TIMUR	3,336,738	2,054,531	5,391,269
185	11.01.11.2009	KEUMUMU HILIR	LABUHANHAJI TIMUR	4,053,649	2,054,531	6,108,180
186	11.01.11.2010	KEUMUMU HULU	LABUHANHAJI TIMUR	2,983,947	2,054,531	5,038,478
187	11.01.11.2011	KEUMUMU SEBERANG	LABUHANHAJI TIMUR	4,871,922	2,054,531	6,926,453
188	11.01.11.2012	SAWANG INDAH	LABUHANHAJI TIMUR	4,993,138	2,054,531	7,047,669
189	11.01.12.2001	TUTONG	LABUHANHAJI BARAT	4,758,590	2,054,531	6,813,121
190	11.01.12.2002	TENGAH IBOH	LABUHANHAJI BARAT	4,105,282	2,054,531	6,159,813
191	11.01.12.2003	PEULOKAN	LABUHANHAJI BARAT	3,586,775	2,054,531	5,641,306
192	11.01.12.2004	KUTA IBOH	LABUHANHAJI BARAT	4,020,574	2,054,531	6,075,105
193	11.01.12.2005	UJUNG PADANG	LABUHANHAJI BARAT	4,337,509	2,054,531	6,392,040
194	11.01.12.2006	BLANG BARU	LABUHANHAJI BARAT	4,096,825	2,054,531	6,151,356
195	11.01.12.2007	BLANG POROH	LABUHANHAJI BARAT	3,816,397	2,054,531	5,870,928
196	11.01.12.2008	PULO IE	LABUHANHAJI BARAT	3,820,420	2,054,531	5,874,951
197	11.01.12.2009	SUAK LOKAN	LABUHANHAJI BARAT	3,382,095	2,054,531	5,436,626

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		
				Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
198	11.01.12.2010	IKU LHUENG	LABUHANHAJI BARAT	3,137,341	2,054,531	5,191,872
199	11.01.12.2011	KUTA TRIENG	LABUHANHAJI BARAT	4,200,041	2,054,531	6,254,572
200	11.01.12.2012	PANTE GEULIMA	LABUHANHAJI BARAT	3,825,647	2,054,531	5,880,178
201	11.01.12.2013	PANTON PAWOH	LABUHANHAJI BARAT	4,501,526	2,054,531	6,556,057
202	11.01.12.2014	BATEE MEUCANANG	LABUHANHAJI BARAT	3,619,088	2,054,531	5,673,619
203	11.01.12.2015	PANTON RUBEEK	LABUHANHAJI BARAT	4,082,042	2,054,531	6,136,573
204	11.01.13.2001	KOTO	KLUET TENGAH	3,404,956	3,539,175	6,944,131
205	11.01.13.2002	ALUR KEUJRUN	KLUET TENGAH	2,430,756	3,539,175	5,969,931
206	11.01.13.2003	JAMBOR PAPAN	KLUET TENGAH	3,562,494	3,539,175	7,101,669
207	11.01.13.2004	MALAKA	KLUET TENGAH	3,299,684	3,539,175	6,838,859
208	11.01.13.2005	KOTO INDARUNG	KLUET TENGAH	4,106,856	3,539,175	7,646,031
209	11.01.13.2006	SIURAI-URAI	KLUET TENGAH	3,076,675	3,539,175	6,615,850
210	11.01.13.2007	KAMPUNG SAWAH	KLUET TENGAH	3,808,007	3,539,175	7,347,182
211	11.01.13.2008	KAMPUNG PADANG	KLUET TENGAH	3,006,767	3,539,175	6,545,942
212	11.01.13.2009	PULO AIR	KLUET TENGAH	4,339,017	3,539,175	7,878,192
213	11.01.13.2010	LAWE MELANG	KLUET TENGAH	3,012,176	3,539,175	6,551,351
214	11.01.13.2011	MERSAK	KLUET TENGAH	3,179,958	3,539,175	6,719,133
215	11.01.13.2014	SIMPANG DUA	KLUET TENGAH	7,937,089	3,539,175	11,476,264
216	11.01.13.2015	SIMPANG TIGA	KLUET TENGAH	2,974,915	3,539,175	6,514,090
217	11.01.14.2001	PAYA DAPUR	KLUET TIMUR	3,608,177	2,527,579	6,135,756
218	11.01.14.2002	SAPIK	KLUET TIMUR	6,445,248	2,527,579	8,972,827
219	11.01.14.2003	ALAI	KLUET TIMUR	3,721,417	2,527,579	6,248,996
220	11.01.14.2004	DURIAN KAWAN	KLUET TIMUR	3,832,725	2,527,579	6,360,304
221	11.01.14.2005	LAWE SAWAH	KLUET TIMUR	3,663,790	2,527,579	6,191,369
222	11.01.14.2006	LAWE BULUH DIDI	KLUET TIMUR	3,568,858	2,527,579	6,096,437
223	11.01.14.2007	PUCUK LEMBANG	KLUET TIMUR	3,794,316	2,527,579	6,321,895
224	11.01.14.2008	PAYA LABA	KLUET TIMUR	3,887,119	2,527,579	6,414,698
225	11.01.14.2009	LAWE CIMANOK	KLUET TIMUR	4,582,872	2,527,579	7,110,451
226	11.01.15.2001	SEUBADEH	BAKONGAN TIMUR	3,991,703	2,297,813	6,289,516
227	11.01.15.2002	LADANG RIMBA	BAKONGAN TIMUR	4,267,747	2,297,813	6,565,560
228	11.01.15.2003	UJONG PULO RAYEUK	BAKONGAN TIMUR	10,145,032	2,297,813	12,442,845
229	11.01.15.2004	SAWAH TINGKEUM	BAKONGAN TIMUR	3,489,522	2,297,813	5,787,335
230	11.01.15.2005	SIMPANG	BAKONGAN TIMUR	2,906,576	2,297,813	5,204,389
231	11.01.15.2006	UJONG PULO CUT	BAKONGAN TIMUR	3,073,531	2,297,813	5,371,344
232	11.01.15.2008	SEULEUKAT	BAKONGAN TIMUR	4,478,673	2,297,813	6,776,486
233	11.01.16.2005	PINTO RIMBA	TRUMON TIMUR	3,516,126	5,602,393	9,118,519
234	11.01.16.2006	KRUENG LUAS	TRUMON TIMUR	3,336,907	5,602,393	8,939,300
235	11.01.16.2007	JAMBO DALEM	TRUMON TIMUR	5,207,108	5,602,393	10,809,501
236	11.01.16.2008	KAPA SEUSAK	TRUMON TIMUR	5,022,163	5,602,393	10,624,556
237	11.01.16.2009	SEUNEUBOK PUNTO	TRUMON TIMUR	2,858,201	5,602,393	8,460,594
238	11.01.16.2010	SEUNEUBOK PUSAKA	TRUMON TIMUR	2,406,292	5,602,393	8,008,685
239	11.01.16.2011	ALUE BUJOK	TRUMON TIMUR	2,820,393	5,602,393	8,422,786
240	11.01.16.2012	TITI POBEN	TRUMON TIMUR	2,350,699	5,602,393	7,953,092
241	11.01.17.2001	BUKET GADENG	KOTA BAHAGIA	5,284,781	3,871,036	9,155,817
242	11.01.17.2002	RAMBONG	KOTA BAHAGIA	3,681,268	3,871,036	7,552,304
243	11.01.17.2003	SEUNEUBOK KEURANJI	KOTA BAHAGIA	4,139,544	3,871,036	8,010,580
244	11.01.17.2004	SEUNEUBOK ALUR BULOH	KOTA BAHAGIA	3,859,671	3,871,036	7,730,707
245	11.01.17.2005	UJONG TANOH	KOTA BAHAGIA	4,925,969	3,871,036	8,797,005
246	11.01.17.2006	UJONG GUNONG CUT	KOTA BAHAGIA	4,289,428	3,871,036	8,160,464
247	11.01.17.2007	UJONG GUNONG RAYEUK	KOTA BAHAGIA	3,608,199	3,871,036	7,479,235
248	11.01.17.2008	BEUTONG	KOTA BAHAGIA	3,027,861	3,871,036	6,898,897
249	11.01.17.2009	JAMBO KEUPOK	KOTA BAHAGIA	3,688,486	3,871,036	7,559,522
250	11.01.17.2010	ALUR_DUAMAS	KOTA BAHAGIA	4,552,289	3,871,036	8,423,325

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		
				Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
251	11.01.18.2001	LADANG RIMBA	TRUMON TENGAH	6,129,236	6,028,137	12,157,373
252	11.01.18.2002	GUNONG KAPHO	TRUMON TENGAH	3,441,942	6,028,137	9,470,079
253	11.01.18.2003	KAMPONG TEUNGOH	TRUMON TENGAH	2,548,773	6,028,137	8,576,910
254	11.01.18.2004	KRUENG BATEE	TRUMON TENGAH	3,807,336	6,028,137	9,835,473
255	11.01.18.2005	PULO PAYA	TRUMON TENGAH	5,284,661	6,028,137	11,312,798
256	11.01.18.2006	JAMBO PAPEUN	TRUMON TENGAH	3,176,288	6,028,137	9,204,425
257	11.01.18.2007	COT BAYU	TRUMON TENGAH	4,801,742	6,028,137	10,829,879
258	11.01.18.2008	NACA	TRUMON TENGAH	4,053,404	6,028,137	10,081,541
259	11.01.18.2009	IE JEUREUNEH	TRUMON TENGAH	6,870,809	6,028,137	12,898,946
260	11.01.18.2010	LHOK RAYA	TRUMON TENGAH	3,267,626	6,028,128	9,295,754
Total				**1,018,084,600**	**890,296,710**	**1,908,381,310**

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAGIAN BESARAN SERTA PETUNJUK PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

PETUNJUK PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

A. LATAR BELAKANG

Pemberian Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah merupakan wujud dari pemenuhan hak gampong untuk menyelenggarakan otonomi gampong dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat mengikuti sesuai pertumbuhan kondisi dari gampong itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, sosial, adat dan budaya serta pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B. PRINSIP PENGELOLAAN

Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong didasarkan atas prinsip-prinsip :

1. seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan, terbuka, akuntabel dan diketahui oleh masyarakat luas;
2. masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan;
3. seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
4. memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
5. hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya; dan
6. hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

C. ARAH PENGGUNAAN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, meliputi:
   a. peningkatan sumber daya manusia Aparatur Gampong meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan, studi banding;
   b. biaya operasional dan tunjangan petugas pungut pajak dan retribusi di gampong;
   c. biaya penguatan kelembagaan gampong;
   d. belanja Penggandaan dan Alat Tulis Kantor;
   e. biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan serta pertanggungjawaban pungutan pajak dan retribusi.
   f. biaya lain-lain yang dipandang perlu dan atau mendesak.

2. Pelaksanaan Pembangunan Gampong, meliputi :
   a. penambahan aset gampong kecuali pengadaan tanah;
   b. belanja pemeliharaan dan perbaikan pasar gampong;
   c. sarana menunjang kesehatan lingkungan, jamban keluarga;
   d. pembangunan/perbaikan sarana dan atau prasarana publik yang rusak akibat bencana alam; dan
   e. pembangunan lain-lain yang dipandang perlu dan atau mendesak.

3. Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, meliputi:
   a. pembinaan keagamaan;
   b. pembinaan pemuda dan olahraga;
   c. pembinaan budaya dan adat istiadat; dan
   d. pembinaan lain-lain yang dipandang perlu dan atau mendesak.

4. Pemberdayaan Masyarakat Gampong, meliputi :
   a. peningkatan keamanan dan ketentraman gampong;
   b. penunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal;
   c. pengembangan lembaga simpan pinjam melalui pembiayaan modal usaha dalam bentuk UEG-SP, Badan Perkreditan Gampong, Koperasi Gampong dan lembaga lainnya;
   d. penambahan pembiayaan modal pada BUMG yang aktif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
   e. pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk;
   f. biaya pengadaan pangan;
   g. biaya siaga bencana; dan
   h. biaya lain-lain yang dipandang perlu dan atau mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

D. PENUTUP

Penggunaan dana disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas, dan sesuai kemampuan keuangan gampong yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Demikian Petunjuk Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong sebagai acuan bagi Pemerintah Gampong dalam melaksanakan kegiatan.

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAGIAN BESARAN SERTA PETUNJUK PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGAJUAN, PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN

1. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGAJUAN

1.1. Format Verifikasi Oleh Tim Fasilitasi

REKOMENDASI DAN VERIFIKASI PERSYARATAN PERMOHONAN PENGAJUAN PENYALURAN DANA GAMPONG, ALOKASI DANA GAMPONG, BAGI HASIL PAJAK DAERAH, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN .....

PENGAJUAN TAHAP .....

Gampong :
Kemukiman :
Kecamatan :
Kabupaten :

I. Check List Kelengkapan Dokumen Pengajuan

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	Permohonan pengajuan penyaluran dari Keuchik/Pj. Keuchik kepada Bupati Aceh Selatan			
2	Fotokopi Qanun RPJMG atau RPJMG Perubahan (khusus tahap I)			
3	Fotokopi Qanun RKPG (khusus tahap I)			
4	Fotokopi Qanun APBG (untuk tahap I, bila ada perubahan APBG untuk tahap akhir)			
5	Fotokopi SK Penunjukan Bank sebagai penyimpan dan pencairan (dilegalisir Keuchik/Pj. Keuchik dan mengetahui Camat)			
6	Fotokopi Rekening Kas Gampong (dilegalisir Keuchik/Pj. Keuchik dan mengetahui Camat)			
7	Fotokopi SK Pengangkatan Keuchik (dilegalisir Camat)			
8	Fotokopi SK Bendahara Gampong (dilegalisir Keuchik/Pj. Keuchik dan mengetahui Camat)			
9	Fotokopi KTP Keuchik/Pj. Keuchik (dilegalisir Camat)			
10	Fotokopi KTP Bendahara Gampong (dilegalisir Camat)			
11	Pakta Integritas (bermaterai cukup)			
12	Kwitansi Penerimaan (bermaterai cukup)			

II. Check List Persyaratan Lainnya

NO	URAIAN	HASIL PERTIMBANGAN	
		YA	TIDAK
1	APBG telah ditetapkan		
2	APBG telah di evaluasi oleh Pemkab. Aceh Selatan		
3	Semua pekerjaan/kegiatan tahun dan atau tahap sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
4	Telah melakukan pemungutan dan penyetoran PBB berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan atau tahun berkenaan. (bila tidak, harus terlampir surat persetujuan pengecualiaan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah)		
5	Mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya, serta hasil pembahasan bersama antar personil Tim Pendamping, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

A. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran. *
B. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Gampong. *

Catatan :

Rekomendasi ini dibuat di : .....
Pada Tanggal : .....
Dibuat oleh Petugas Verifikasi dari Tim Fasilitasi

NO	NAMA	JABATAN		TANDA TANGAN
		DALAM KEDINASAN	DALAM TIM	
1		Camat	Ketua	
2		Sekretaris Camat	Sekretaris	
3		Kapolsek	Anggota	
4		Dan Ramil	Anggota	
5		Kasi PMG	Anggota	
6		Kasi Pemerintahan	Anggota	

Diketahui/disetujui :
KETUA TIM FASILITASI

.....

*) Coret yang tidak sesuai.

CONTOH FORMAT PELAPORAN

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Laporan Akhir Tahun

LAPORAN AKHIR TAHUN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH GAMPONG .....
KEMUKIMAN ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN .....

Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. .....
Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. .....
Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah	
Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. .....
Realisasi Pengeluaran/Belanja	Rp. .....
Jumlah SILPA	Rp. .....

NO	URAIAN	REALISASI			PARTISIPASI MASY / DANA SWADAYA	PERMASALAHAN		KET
		ANGGARAN	BELANJA	SISA		YANG TERJADI	PEMECAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Bukti-bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti pendukung asli yang tercantum dalam laporan tersebut kami simpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

....., ...20....

Keuchik .....

.....

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA